

PENETAPAN SATUAN TUGAS POSKO PENGADUAN PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

2020

NOMOR : 004/K.Bawaslu.KT-06/HK.01.01/I/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS POSKO PENGADUAN PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Abstrak : Pengawasan Pembentukan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan salah satu tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Katingan, Bahwa Pengawasan Pembentukan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Katingan, dilaksanakan dengan strategi pengawasan melekat;
- : Dasar hukum putusan ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- : Menetapkan tentang Penetapan Satuan Tugas Posko Pengaduan Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Katingan, masing-masing atas nama (terlampir), sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas tentang Penetapan Satuan Tugas Posko Pengaduan Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Katingan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS Dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- Catatan : Ditetapkan di Kasongan tanggal 15 Januari 2020
- Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya